



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

TAHUN 2020



**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN KUTAI BARAT**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020 telah dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014, Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat selama tahun 2019.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 memuat informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat yaitu: **“TERWUJUDNYA PERTANAHAN YANG TERTIB ADMINISTRASI SERTA KAWASAN PERMUKIMAN, PERUMAHAN YANG LAYAK DAN BERSIH MELALUI PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN ”**,

Hasil pencapaian kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Sendawar, 15 Februari 2021

P l t .

K e p a l a D i n a s ,

SAHADI,S.Hut,M.Si

NIP. 19730826 200112 1 003

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	2
C. STRUKTUR ORGANISASI.....	11
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	14
BAB II RENCANA KINERJA.....	15
A. RENCANA STRATEGIS 2017-2021.....	15
B. TUJUAN DAN SASARAN.....	16
C. PENETAPAN KINERJA TAHUNAN.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	20
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	20
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	21
C. REALISASI ANGGARAN.....	34
BAB IV PENUTUP.....	36
LAMPIRAN 1. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI	
LAMPIRAN 2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021	

BAB I P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia saat ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis dan mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain : transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga faktor tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari *Good Governance* tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan institusi pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPRRI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang tata cara penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal diatas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2020 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta urusan Pemerintahan bidang Pertanahan .

2. Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Perumahan Kawasan Permukiman, bidang Kebersihan dan Persampahan dan di Bidang Pertanahan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
- b. Perencanaan, Pembinaan, dan Pengendalian kebijakan teknis di Bidang Perumahan dan Permukiman, bidang Kebersihan dan Persampahan serta bidang Pertanahan;
- c. Perumusan, Perencanaan dan Pengendalian kebijakan teknis di bidang perumahan;
- d. Penyelenggara urusan kesekretariatan;
- e. Pelaksana unit pelaksana teknis Dinas;
- f. Pembinaan Kelompok jabatan fungsional;

g. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

3. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang perumahan, kawasan permukiman, pertanahan, pelayanan kebersihan dan pengelolaan persampahan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perumahan, kawasan permukiman, pertanahan, pelayanan kebersihan dan pengelolaan persampahan;
- b. Penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang perumahan, kawasan permukiman, pertanahan, pelayanan kebersihan serta pengangkutan dan pengelolaan persampahan;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang perumahan, kawasan permukiman, pertanahan, pelayanan kebersihan serta pengangkutan dan pengelolaan persampahan;
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian dan pengendalian kegiatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, penyusunan program dan penatausahaan keuangan
- e. Pelaksanaan unit pelaksana teknis daerah;
- f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Sekretaris :

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam menyelenggarakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan kesekretariatan yang meliputi

administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, penyusunan program dan penatausahaan keuangan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
- b. penyusunan program, kegiatan dan anggaran serta penatausahaan keuangan;
- c. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang-bidang;
- d. Pengelolaan dan penyediaan data dan informasi;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Sub Bagian Umum

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan serta pembinaan kepegawaian;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta keprotokolan;
- b. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan penyusunan program kerja, kegiatan dan anggaran serta melaksanakan penatausahaan dan pelaporan keuangan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan dan menyusun dokumen rencana strategis;
- c. Melaksanakan kordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan;
- d. Melaksanakan sistem informasi perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- e. Menyusun laporan realisasi fisik dan keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan secara berkala;
- f. Menyiapkan bahan dan menyusun dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- g. Menyiapkan bahan dan melakukan kordinasi dengan bidang-bidang dalam penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
- h. Menyusun bahan kerjasama, publikasi dan hubungan masyarakat dibidang perumahan, kawasan permukiman, pertanahan, pelayanan kebersihan serta pengangkutan dan pengelolaan persampahan;
- i. Melaksanakan penatausahaan keuangan yang meliputi perhitungan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan;
- j. Melaksanakan administrasi gaji;
- k. Menyusun laporan keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan secara berkala;
- l. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;

- m. Menyiapkan dan menyampaikan bahan penyusunan dokumen LAKIP, LPPD dan LKPj Bupati; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan perumusan dan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh serta prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi perumahan;
- b. Penyusunan rumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Seksi Perumahan Rakyat

Kepala Seksi Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menyiapkan bahan penyusunan dan penyelenggaraan kawasan permukiman;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Seksi Perumahan Rakyat mempunyai fungsi :

1. Pendataan, perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
2. Pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
3. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

9. Seksi Kawasan Permukiman

Kepala Seksi Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menyiapkan bahan penyusunan dan penyelenggaraan kawasan permukiman;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Seksi Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

1. Pendataan, perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
2. Pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
3. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

10. Bidang Kebersihan dan Persampahan

Kepala Bidang Kebersihan dan Persampahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan perumusan dan penyelenggaraan pelayanan kebersihan, pengangkutan dan pengelolaan persampahan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Seksi Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang pelayanan kebersihan, pengangkutan dan pengelolaan persampahan;
2. Penyusunan perencanaan, penyediaan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan dan persampahan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan kebersihan, pengangkutan dan pengelolaan persampahan;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

11. Seksi Pelayanan Kebersihan

Kepala Seksi Pelayanan Kebersihan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kebersihan dan Persampahan dalam menyiapkan bahan penyusunan dan penyelenggaraan pelayanan kebersihan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Seksi Pelayanan Kebersihan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelayanan kebersihan;
2. Pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan pengendalian sarana dan prasarana pelayanan kebersihan;
3. Perencanaan kegiatan peningkatan layanan kebersihan;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

12. Seksi Pengangkutan dan Pengelolaan Persampahan

Kepala Seksi Pengangkutan dan Pengelolaan Persampahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kebersihan dan Persampahan dalam

menyiapkan bahan penyusunan dan penyelenggaraan pengangkutan dan pengelolaan persampahan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Seksi Seksi Pengangkutan dan Pengelolaan Persampahan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengangkutan dan pengelolaan persampahan;
2. Pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan pengendalian sarana dan prasarana pengangkutan dan pengelolaan persampahan;
3. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengangkutan dan pengelolaan persampahan;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

13. Bidang Pertanahan

Kepala Bidang Pertanahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan dibidang perijinan dan pengadaan pertanahan serta sengeketa tanah, penggantian kerugian dan santunan tanah;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Seksi Bidang Pertanahan mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan kebijakan pelaksanaan perijinan dan pengadaan pertanahan, sengeketa tanah, penggantian kerugian dan santunan tanah;
2. Penyelenggaraan fasilitasi perijinan dan pengadaan pertanahan, sengeketa tanah, penggantian kerugian dan santunan tanah;
3. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi terhadap perijinan dan pengadaan pertanahan, sengeketa tanah, penggantian kerugian dan santunan tanah;

4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

14. Seksi Perizinan dan Pengadaan Tanah

Kepala Seksi Perizinan dan Pengadaan Pertanahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pertanahan dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perizinan dan pengadaan pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Seksi Perizinan dan Pengadaan Tanah mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rumusan kebijakan pelaksanaan perizinan dan pengadaan pertanahan;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang perizinan dan pengadaan pertanahan;
3. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan perijinan dan pengadaan pertanahan;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

15. Seksi Sengketa Tanah, Penggantian Kerugian dan Santunan Tanah

Kepala Seksi Sengketa Tanah, Penggantian Kerugian dan Santunan Tanah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pertanahan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan kebijakan dibidang sengketa tanah, penggantian kerugian dan santunan tanah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Seksi Seksi Sengketa Tanah, Penggantian Kerugian dan Santunan Tanah mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan penyelesaian sengketa tanah, penggantian kerugian dan santunan tanah;
2. Penyiapan norma, standar, pedoman dan kriteria penyelesaian sengketa tanah, penggantian kerugian dan santunan tanah;

3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyelesaian sengketa tanah, penggantian kerugian dan santunan tanah;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
3. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - a. Seksi Perumahan Rakyat ;
 - b. Seksi Kawasan Permukiman;
4. Bidang Kebersihan dan Persampahan ;
 - a. Seksi Pelayanan Kebersihan;
 - b. Seksi Pengangkutan dan Pengelolaan Persampahan;
5. Bidang Pertanahan;
 - a. Seksi Sengketa Tanah, Penggantian Kerugian dan Santunan Tanah;
 - b. Seksi Perizinan dan pengadaan Pertanahan;
6. Kelompok Jabatan Fungsional;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN



D. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat selama tahun 2020. Capaian kinerja (*performance results*) 2020 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) 2020 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat tahun 2020 adalah sebagai berikut ini :

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat dan struktur organisasi.

Bab II – Rencana Kinerja, menjelaskan muatan Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat untuk periode 2017 – 2021 dan Penetapan Kinerja untuk tahun 2020.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian indikator kinerja utama Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Barat serta analisis pencapaian kinerja dikaitkan dengan pertanggungjawaban manajerial terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2020.

Bab IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat tahun 2020 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

RENCANA KINERJA

A. Rencana Strategis 2017-2021

Secara yuridis berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta urusan pemerintahan bidang Pertanahan. Sebagai perangkat Daerah teknis yang membantu tugas-tugas Bupati pada bidang Perumahan, Kawasan permukiman, Bidang Pertanahan, Kebersihan dan Persampahan maka untuk mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan Visi Misi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, sebagai berikut :

Visi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah :

“TERWUJUDNYA PERTANAHAN YANG TERTIB ADMINISTRASI SERTA KAWASAN PERMUKIMAN, PERUMAHAN YANG LAYAK DAN BERSIH MELALUI PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN”

Penjabaran Visi tersebut adalah sebagai berikut:

Pertanahan yang tertib administrasi adalah bahwa data-data setiap bidang tanah tercatat dan tersusun secara sistematis diketahui dengan mudah, baik mengenai riwayat, kepemilikan, subjek haknya, keadaan fisik serta ketertiban prosedur dalam setiap urusan yang menyangkut tanah di bidang Pemerintahan.

Kawasan Permukiman, Perumahan yang layak dan bersih yaitu terciptanya lingkungan permukiman, perumahan yang memenuhi persyaratan kebutuhan dasar bagi masyarakat secara merata di seluruh wilayah di Kabupaten Kutai Barat, serta meningkatkan kualitas permukiman yang layak dan bersih.

Pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang terencana dan berkesinambungan yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi saat ini dan generasi di masa mendatang.

Misi :

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, sebagai penjabarannya dituangkan dalam bentuk misi yang dapat memberikan arah, tujuan yang ingin dicapai dan memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan serta untuk menumbuhkan partisipasi semua pihak.

Adapun misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja pelayanan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan kabupaten Kutai Barat.
2. Mewujudkan tertib administrasi di bidang pertanahan yang terkait dengan pemerintahan daerah.
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana, prasarana dan utilitas umum kawasan permukiman.
4. Meningkatkan fasilitasi ketersediaan dan kualitas perumahan yang terjangkau.
5. Mewujudkan Kabupaten Kutai Barat yang bersih, asri, nyaman, indah dan ramah lingkungan.

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan misi sebagaimana yang telah ditetapkan maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, antara lain :

a) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman :

- 1) Menyelenggarakan pembangunan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman yang terpadu dan berkelanjutan dalam mendukung keseimbangan pembangunan daerah terutama prasarana, sarana dan utilitas dilingkungan Perumahan Kumuh dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)di kawasan tertinggal, kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, dan kawasan kumuh;
- 2) Menyelenggarakan pembangunan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman untuk mendukung kedaulatan pangan, dan ketahanan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.

- 3) Menyelenggaraan pembangunan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman untuk kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu;
- 4) Menyelenggaraan pembinaan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman penyelenggaraan Perumahan, penyelenggaraan kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat;
- 5) Menyelenggarakan pembangunan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman untuk mendukung layanan infrastruktur dasar, prasarana, sarana dan utilitas yang layak guna agar terwujudnya kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”;
- 6) Menyelenggarakan tata kelola pembangunan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel untuk mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat dan mandiri, dan berkepribadian.

Tujuan dicanangkan untuk jangka 5 (Lima) tahun. Pada dasarnya tujuan adalah suatu kondisi ideal, lebih berhasil, lebih maju, lebih bahagia, yang ingin diwujudkan atau dihasilkan, atau dengan kata lain ingin menjadikan suatu realita antara keinginan (das sollen) dan kenyataan (das sein), pada kurun waktu tertentu.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat dalam waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Karakteristik dari sasaran paling tidak terdiri atas: SMART (Specific, Measurable, Acceptable, Result, Timeliness). Sasaran merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan strategis yang terfokus pada tindakan dan alokasi dan sumber daya dalam kegiatan atau aktifitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur baik

secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu baik tahunan, semesteran, triwulan, atau bulanan.

2. Strategi dan Kebijakan

Strategi yang dimiliki Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah :

- a. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan-Pelatihan.
- b. Mengembangkan lingkungan permukiman yang sehat.
- c. Meningkatkan kualitas fisik bangunan dan wilayah melalui penataan kawasan permukiman penduduk.
- d. Mewujudkan kondisi lingkungan permukiman yang sehat, aman, teratur, harmonis, dan berkelanjutan.
- e. Peningkatan kinerja penataan ruang daerah dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya tata ruang.
- f. Koordinasi dan pengawasan penyelenggaraan sanitasi perkotaan.
- g. Bekerja sama dengan pemerintah kecamatan se-Kabupaten Kutai Barat dalam hal perizinan kepemilikan tanah.
- h. Meningkatkan manajemen kebersihan dan meningkatkan kualitas SDM di bidang pengelolaan kebersihan yang kompeten, kredibel, inovatif dan mampu berperilaku sebagai pelayan masyarakat.
- i. Pemasangan spanduk perda tentang kebersihan.
- j. Mensosialisasikan pengolahan sampah berbasis rumah tangga, guna mengurangi volume sampah langsung dari sumbernya.

3. Kebijakan

- a. Membangun Rumah Layak Huni bagi masyarakat kurang mampu dan masyarakat kawasan kumuh.
- b. Membangun Infrastruktur permukiman penduduk.
- c. Membangun sarana, prasarana dan utilitas umum kawasan permukiman.
- d. Melaksanakan Program PRONA/PRODA Pertanahan.
- e. Menyelesaikan Sengketa Tanah yang terjadi di masyarakat Kutai Barat.
- f. Menggalakkan program Kutai Barat Bebas Sampah.

C. Penetapan Kinerja Tahunan

Dengan telah diterbitkannya Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Penetapan Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Penetapan Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat dapat dilihat pada lampiran 2.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Secara umum, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat telah melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat tahun 2017 – 2021.

Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidak berhasilan kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi pada periode berikutnya. Untuk mengukur sampai sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran sasaran tersebut digunakan skala ordinal sebagai berikut:

**Tabel 3.1
Skala Ordinal**

No	Capaian Kinerja	Keterangan
1.	Nilai 85 s.d 100	Sangat Berhasil
2.	Nilai 70 < 85	Berhasil
3.	Nilai 55 < 70	Cukup Berhasil
4.	Nilai < 55	Kurang Berhasil

Berdasarkan Hasil analisis pengukuran terhadap 3 sasaran tersebut dibawah ini, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Sebanyak 2 sasaran dengan tingkat keberhasilan capaian kinerja 100 dengan nilai 100% dengan kategori Sangat Berhasil (nilai 85 s.d 100);
2. Sebanyak 1 sasaran dengan tingkat keberhasilan 83,33% dengan kategori Sangat Berhasil (nilai 70 < 85);

Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran kinerja yang dimaksudkan untuk menilai tingkat keberhasilan dan ketidak berhasilan guna meningkatkan kinerja organisasi.

Capaian kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat dalam penyelenggaraan pemerintahan tahun 2020 sebesar 185% atau termasuk kategori “SANGAT BERHASIL” .

Secara rinci capaian sasaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat telah ditetapkan dalam kinerja tahun 2020 disampaikan dalam uraian berikut ini.

Tabel 3.2

Kategori Pencapaian Sasaran Tahun 2020

No	Kategori pencapaian Sasaran	Jumlah Sasaran
1	Sangat Berhasil	3
2	Berhasil	0
3	Cukup Berhasil	0
4	Kurang Berhasil	0
Jumlah		3

B. Analisis Capaian Kinerja

Capaian Indikator kinerja sasaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Sasaran Strategis pertama yaitu Mewujudkan lingkungan Kota Sendawar dan sekitarnya yang bersih, asri, serta bebas sampah Untuk menilai keberhasilan/kegagalan sasaran ini menggunakan 2 indikator kinerja dengan tingkat keberhasilan mencapai 86,33 % dengan kategori **Sangat Berhasil**.

Tabel 3.3

Prosentase Keberhasilan / Kegagalan sasaran 1

No	Sasaran	Indikator Sasaran	2020		%	Kategori
			Target	Realisasi		
1	Mewujudkan lingkungan Kota Sendawar dan sekitarnya yang bersih, asri, serta bebas sampah	Kebersihan Lingkungan Ibu Kota Sendawar dan Sekitarnya Serta Tertanganinya Sampah di Lingkungan Ibu Kota Sendawar dan Sekitarnya	62,68%	91,66%	91,66%	Sangat Berhasil
Tingkat Keberhasilan					91,66%	Sangat Berhasil

Untuk mendukung pencapaian sasaran maka dilaksanakan dengan menjalankan program dan kegiatan sebagai berikut.

Tabel 3.1

Presentase Keberhasilan / Kegagalan sasaran 1

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2020		%	Kategori
				Target	Realisasi		
I	Program Pelayanan Kebersihan	Cakupan Pelayanan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di Seputar Kota Sendawar					
	Terlaksananya Pengadaan	Tersaediannya Pakaian Kerja					

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

1	Pakaian Kerja petugas lapangan Seksi Kebersihan	petugas lapangan Seksi Kebersihan	Baju dan Sepatu Kerja	144 set (42 baju kerja dan 42 Sepatu)	144 set (42 baju dan 42 Sepatu)	100%	Sangat Berhasil
2	Terlaksananya Monitoring Kebersihan di 16 Kecamatan	Terpantaunya Kebersihan di 16 Kecamatan	Kecamatan	16	16	100%	Sangat Berhasil
3	Terlaksananya Kegiatan Gotong Royong Jumat Bersih	Tersedianya Konsumsi Kegiatan Gotong Royong	Bulan	12	12	100%	Sangat Berhasil
4	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja Kebersihan dan Persampahan	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja Kebersihan dan Persampahan	Jenis	4	4	100%	Sangat Berhasil
5	Terlaksananya Penilaian OPD Terbersih	Tersedianya Pemenang Perlombaan	Kali	1	0	0%	Kurang Berhasil (Kegiatan Tidak dilaksanakan dikarenakan Pandemi Covid 19)
	Terlaksananya Lingkungan	Terciptanya					

6	Bersih Pada Tempat tempat Kegiatan Hari hari besar dan Kegiatan kegiatan Tertentu	Lingkungan Bersih Pada Tempat tempat Kegiatan Hari hari besar dan Kegiatan kegiatan Tertentu	Bulan	12	12	100%	Sangat Berhasil
II	Program Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Kebersihan Kota	Cakupan Penanganan Sampah Perkotaan					
1.	Tersedianya Pengadaan Pakaian Kerja petugas lapangan Seksi Persampahan	Tersedianya Pakaian Kerja petugas lapangan Seksi Persampahan	Orang	138	138	100%	Sangat Berhasil
2.	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja Seksi Persampahan	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja Seksi Persampahan	Jenis Pengad aan Peralata n dan Perleng kapan Kerja Seksi Persam pahan	7	7	100%	Sangat Berhasil
3.	Terlaksananya Promosi / Kompanye / Edukasi Higenis dan Berkelanjutan tentang Persampahan dan IPLT	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja Seksi Persampahan	Kec.	3	3	100%	Sangat Berhasil
4.	Terlaksananya Pengadaan	Tersedianya Pengadaan Tong					

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

	Tong Sampah Terpilah 3R	Sampah Terpilah 3R	Unit	20	20	100%	Sangat Berhasil
5.	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPA Belau	Terpeliharanya Workshop, IPLT, Pos Jaga, Jembatan Timbang Rumah Jaga dan Kolam Leached (Air Lindi) di TPA Belau	Bulan	12	12	100%	Sangat Berhasil
6.	Terlaksananya Pembangunan Gapura dan Pintu TPA Belau	Bersih dan Terpeliharanya Kondisi Lingkungan TPA Belau	Ha	15	15	100%	Sangat Berhasil
7.	Terlaksananya Pembangunan Gapura dan Pintu TPA Belau	Tersedianya Gapura dan Pintu TPA Bela	Gapura	1	1	100%	Sangat Berhasil
8.	Terlaksananya Pembangunan Gedung TPS3R Kampung Sumber Sari	Tersedianya Pembangunan Gedung TPS3R Kampung Sumber Sari	Unit	1	1	0	**
9.	Terlaksananya Pengadaan Mesin Pencacah Sampah Kampung Sumber Sari	Tersedianya Mesin Pencacah Sampah Kampung Sumber Sari	Paket	1	1	100	
10	Terlaksananya Pengadaan Mesin Pencacah Sampah di TPA Belau	Tersedianya Mesin Pencacah Sampah di TPA Belau	Paket	1	1	100	

- Sasaran Strategis Kedua yaitu Meningkatkan Tertib Administrasi Pengelolaan Pertanahan dan kepastian hukum penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Untuk menilai keberhasilan/kegagalan sasaran ini menggunakan dua indikator yaitu

Terpenuhinya Kelengkapan Administrasi Kepemilikan Tanah Bagi Pemerintah, Masyarakat dan Swasta Serta Tertanganinya Kasus Sengketa Tanah dengan tingkat keberhasilan mencapai 84,37% dengan kategori Berhasil.

➤ Tabel 2

➤ Prosentase Keberhasilan / Kegagalan sasaran 2

No	Sasaran	Indikator Sasaran	2020		%	Kategori
			Target	Realisasi		
1	Meningkatkan Tertib Administrasi Pengelolaan Pertanahan dan kepastian hukum penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Terpenuhinya Kelengkapan Administrasi Kepemilikan Tanah Bagi Pemerintah, Masyarakat dan Swasta Serta Tertanganinya Kasus Sengketa Tanah	37%	84,37 %	84,37 %	Berhasil
Tingkat Keberhasilan					84,37%	berhasil

Untuk mendukung pencapaian sasaran maka dilaksanakan dengan menjalankan program dan kegiatan sebagai berikut.

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2020		%	Kategori
				Target	Realisasi		
	Program Penataan dan Pengelolaan Pertanahan						

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

1.	Terlaksananya Fasilitas dan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah	Tercapainya Fasilitas dan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah	Laporan	36	36	100%	Sangat Berhasil
2.	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Bidang Pertanahan	Sampainya Informasi Tentang Peraturan Perundang – Undangan di Bidang Pertanahan Kepada Masyarakat	Meningkat SDM	175	0	0%	Kurang Berhasil (**)
3	Terlaksananya Fasilitas Penyelesaian Konflik Pertanahan, Aset Pemerintah dan Masyarakat	Tersedianya Fasilitas Penyelesaian Konflik Pertanahan, Aset Pemerintah dan Masyarakat	Laporan	8	8	100%	Sangat Berhasil
4	Terlaksananya Fasilitas Ganti Rugi Tanah Pemerintah, Masyarakat dan Pihak Swasta	Tersedianya Fasilitas Ganti Rugi Tanah Pemerintah, Masyarakat dan Pihak Swasta	Laporan	31	31	100%	Sangat Berhasil
5	Terlaksananya Sosialisasi tahapan	Tersedianya Sosialisasi tahapan sengketa	Laporan	6	0	0%	Kurang Berhasil

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

	tahapan sengketa tanah kepada masyarakat	tanah kepada masyarakat					(**)
6	Terlaksananya Pengadaan sarana pendukung penyelesaian sengketa tanah	Tersedianya Pengadaan sarana pendukung penyelesaian sengketa tanah	Jenis	4	4	100%	Sangat Berhasil
7	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Perolehan Tanah bagi Perusahaan	Tersedianya Pengawasan dan Pengendalian Perolehan Tanah bagi Perusahaan	Kecamatan	6	6	100%	Sangat Berhasil
8	Terlaksananya Pendataan dan Perizinan Pertanahan	Tersedianya Pendataan dan Perizinan Pertanahan	Perijinan Kecamatan	25	25	100%	Sangat Berhasil
9	Terlaksananya Bimtek Luar daerah Tentang Pertanahan	Tersedianya Bimtek Luar daerah Tentang Pertanahan	Orang	2	2	100%	Sangat Berhasil
10	Terlaksananya Koordinasi Pengadaan Tanah dan Penetapan Lokasi Tanah untuk	Tersedianya Koordinasi Pengadaan Tanah dan Penetapan Lokasi Tanah untuk Kepentingan Umum	Kecamatan	4	4	100%	Sangat Berhasil

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

	Kepentingan Umum						
11	Terlaksananya Monitoring dan Pembinaan Administrasi Pertanahan di Kecamatan	Tersedianya Monitoring dan Pembinaan Administrasi Pertanahan di Kecamatan	Pelaporan	8	8	100%	Sangat Berhasil
12	Terlaksananya Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL)	Tersedianya Sertifikat Tanah	Kecamatan	3	3	100%	Sangat Berhasil
13	Terlaksananya Penyediaan Perumusan Pelaksanakan Program Kegiatan Perizinan dan Pengadaan Pertanahan	Tersedianya Rumusan Pelaksanakan Program Kegiatan Perizinan dan Pengadaan Pertanahan	Dokumen SOP Pertanahan	1	1	100%	Sangat Baik
14	Terlaksananya Pembuatan Sertifikat Tanah Pemerintah Daerah	Tersedianya Sertifikat Tanah Pemerintah Daerah	Sertifikat	40	40	100%	Sangat Berhasil
15	Terlaksananya Pembuatan dan Pemasangan	Tersedianya Pembuatan dan Pemasangan Patok Tanah Pemerintah	Patok	400	400	100%	Sangat Berhasil

	Patok Tanah Pemerintah Daerah	Daerah					
16	Terlaksananya Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pemakaman Umum Kabupaten Kutai Barat	Tersedianya Tanah Untuk Pembangunan Pemakaman Umum Kabupaten Kutai Barat	Ha	15	0	0%	Kurang Berhasil (Tim Pnilai blum Bisa memberi kan hasil penilaian ata hak Tanah masih Menggu nakan SKPT)
17	Terlaksananya Fasilitasi Appraisal	Tersedianya Dokumen Appraisal	Dokumen	1	1	100%	Sangat Berhasil
18	Terlaksananya Appraisal Penyediaan Lahan Sarana Olah Raga Kecamatan Bongan	Tersedianya Dokumen Appraisal Lahan Sarana Olah Raga Kecamatan Bongan	Dokumen	1	1	100%	Sangat Berhasil
19	Terlaksananya Pengadaan Lahan Kuburan Kampung Bakung	Tersedianya Lahan Kuburan Kampung Bakung	Lahan	1	0	0%	Kurang Berhasil (Karena Tim Penilai bisa Mengelu arkan

							Hail Penilaian dikarenakan atas Hak Tanah masih menggunakan SKPT)
20	Tersedianya Dokumen Apraisal	Tersedianya Apraisal Lahan untuk Bendung Muara Asa	Dokumen	1	0%	0%	Kurang Berhasil (Karena Tim Penilai bisa Mengeluarkan Hail Penilaian dikarenakan atas Hak Tanah masih menggunakan SKPT)
21	Terlaksananya Apraisal Pemakaman Umum Kutai Barat	Tersedianya Apraisal Pemakaman Umum Kutai Barat	Dokumen	1	0%	0%	Kurang Berhasil (Karena Tim Penilai bisa Mengeluarkan Hail Penilaian dikarenakan atas Hak Tanah

							masih menggunakan SKPT)
22	Terlaksananya Apraisal Lahan Asrama Kutai Barat di Malang	Tersedianya Apraisal Lahan Asrama Kutai Barat di Malang	Dokumen	1	0%	0%	Sangat Berhasil (Karena Ssertifikat dan IMB masih menjadi jaminan di Bank)
23	Terlaksananya Pengadaan Lahan Pemakaman (IKETIM)	Tersedianya Pengadaan Lahan Pemakaman (IKETIM)	Ha	2	0%	0%	Kurang BerHasil (1. Nama Sertifikat dan Nama Penjul Lahan Berbeda 2. Belum adanya Balik Nama dari sertifikat lama ke Pemilik baru)

- Sasaran Strategis Ketiga Tersedianya Jalan dan Jembatan dalam permukiman penduduk serta tersedianya rumah yang layak beserta Sarana dan Prasarananya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Untuk menilai keberhasilan/kegagalan sasaran ini menggunakan indikator Tersedianya Jalan dan Jembatan dalam permukiman penduduk, serta tersedianya rumah yang layak beserta Sarana dan Prasarananya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) kinerja dengan tingkat keberhasilan mencapai 100% dengan katgori Berhasil.

Tabel 3
Prosentase Keberhasilan / Kegagalan sasaran 3

No	Sasaran	Indikator Sasaran	2020		%	Kategori
			Target	Realisasi		
1	Meningkatkan pembangunan jalan dan jembatan dalam permukiman beserta sarana dan prasarana serta Meningkatkan kualitas dan kuantitas perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Tersedianya Jalan dan Jembatan dalam permukiman penduduk Serta Tersedianya rumah yang layak beserta Sarana dan Prasarananya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	37%	100%	100%	
Tingkat Keberhasilan					100%	

Untuk mendukung pencapaian sasaran maka dilaksanakan dengan menjalankan program dan kegiatan sebagai berikut.

Tabel 3.5
Prosentase Keberhasilan / Kegagalan sasaran 3

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2020		%	Kategori
				Target	Realisasi		
1	Terlaksananya Lanjutan Semenisasi Gang Rambutan	Tersedianya Lanjutan Semenisasi Gang Rambutan	Meter	170	170	100%	Sangat Berhasil
2	Terlaksananya Lanjutan	Tersedianya					

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

	Semenisasi Gang Pasoq Kelurahan Simpang Raya	Lanjutan Semenisasi Gang Pasoq Kelurahan Simpang Raya	Meter	85	85	100%	Sangat berhasil
3	Terlaksananya Lanjutan Semenisasi Gang Ringeng Kelurahan Simpang Raya	Tersedianya Lanjutan Semenisasi Gang Ringeng Kelurahan Simpang Raya	Meter	70	70	100%	Sangat berhasil
4	Terlaksananya Lanjutan Semenisasi Gang Keluarga Kelurahan Simpang Raya	Tersedianya Semenisasi Gang Keluarga Kelurahan Simpang Raya	Meter	209	209	100%	Sangat Berhasil
5	Terlaksananya Lanjutan Semenisasi Bertulang Gang Swadaya Jln RA Kartini RT 30 Mentiwan Kelurahan Melak Ulu	Tersedianya Lanjutan Semenisasi Bertulang Gang Swadaya Jln RA Kartini RT 30 Mentiwan Kelurahan Melak Ulu	Meter	70	70	100%	Sangat Berhasil
6	Terlaksananya Semenisasi Jalan Tuncupm Sapikng RT 13 Gang Keluarga Kec. Barong Tongkok	Tersedianya Semenisasi Jalan Tuncupm Sapikng RT 13 Gang Keluarga Kec. Barong	Meter	70	70	100%	Sangat Berhasil

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

		Tongkok					
7	Terlaksananya Lanjutan Semenisasi Jalan Kerbangan Sekolaq Darat	Tersedianya Bangunan Drainase RT. 1 Kapten Piere Tendeau Melak Ulu	Meter	162	162	100%	Sangat Berhasil
8	Terlaksananya Semenisasi Gang Gawai Kampung Linggang Melapeh Baru	Tersedianya Bangunan Drainase RT. 1 Kapten Piere Tendeau Melak Ulu	Meter	70	70	100%	Sangat Berhasil
9	Terlaksananya Study Penetapan Kawasan Kumuh Kutai Barat	Tersedianya Bangunan Drainase RT. 1 Kapten Piere Tendeau Melak Ulu	Dokumen	1	1	100%	Sangat Berhasil
10	Terlaksananya Semenisasi Gang Firdaus Kampung Busur	Tersedianya Bangunan Drainase RT. 1 Kapten Piere Tendeau Melak Ulu	Meter	68	68	100%	Sangat Berhasil
11	Terlaksananya Semenisasi Gang Mpo Gerungkung Kec. Barong Tongkok	Tersedianya Bangunan Drainase RT. 1 Kapten Piere Tendeau Melak Ulu	Meter	46	46	100%	Sangat Berhasil
12	Terlaksananya Semenisasi Gang Thafis Jl. H. Nurdin Kelurahan Melak Ulu	Tersedianya Bangunan Drainase RT. 1 Kapten Piere Tendeau Melak Ulu	Meter	40	40	100%	Sangat Berhasil
13	Terlaksananya Pembangunan	Tersedianya Bangunan Drainase RT.	Meter	32	32	100%	Sangat

	MCK di RT. 01 Kampung Muara Mujan Kecamatan Tering	1 Kapten Piere Tendean Melak Ulu					Berhasil
14	Terlaksananya Pembangunan WC Umum di dalam Kampung Kelian Dalam RT. 01, 02 dan 03 Kampung Kelian Dalam Kecamatan Tering	Tersedianya Bangunan Drainase RT. 1 Kapten Piere Tendean Melak Ulu	Meter	16	16	100%	Sangat Berhasil
15	Terlaksananya Semenisasi Gang Florida RT. 002 Kampung Ombau Asa	Tersedianya Bangunan Drainase RT. 1 Kapten Piere Tendean Melak Ulu	Meter	44	44	100%	Sangat Berhasil
16	Terlaksananya Semenisasi Gang Walet RT. 09 Busur	Tersedianya Bangunan Drainase RT. 1 Kapten Piere Tendean Melak Ulu	Meter	46	46	100%	Sangat Berhasil
17	Terlaksananya Pembangunan Jalan Menuju Land Fill Baru	Tersedianya Bangunan Drainase RT. 1 Kapten Piere Tendean Melak Ulu	Meter	67	67	100%	Sangat Berhasil
18	Terlaksananya Semenisasi Gang Bata Merah	Tersedianya Bangunan Drainase RT. 1 Kapten Piere	Meter	66	66	100%	Sangat Berhasil

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

	Sekolaq Muliaq	Tendean Melak Ulu					
19	Terlaksananya Pembangunan Drainase RT. 1 Kapten Piere Tendean Melak Ulu	Tersedianya Bangunan Drainase RT. 1 Kapten Piere Tendean Melak Ulu	Meter	67	67	100%	Sangat Berhasil
20	Telaksananya Pembangunan Jembatan Ulin Kampung Tanjung Jone	Tersedianya Pembangunan Jembatan Ulin Kampung Tanjung Jone	Meter	30	30	100%	Sangat Berhasil
21	Terlaksananya Pembangunan Jembatan Ulin Kampung Tanjung Jone	Tersedianya Pembangunan Jembatan Ulin Kampung Tanjung Jone	Meter	61	61	100	Sangat Berhasil
22	Terlaksananya Semenisasi Menuju Permandian Umum Tuncum Saping	Tersedianya Semenisasi Menuju Permandian Umum Tuncum Saping	Meter	42	42	100%	Sangat Berhasil
23	Terlaksananya Semenisasi Gang Sarap Dempar Kecamatan Nyuatan	Tersedianya Semenisasi Gang Sarap Dempar Kecamatan Nyuatan	Meter	76	76	100%	Sangat Berhasil

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2020		%	Kategori
				Target	Realisasi		
1	Terlaksananya Pembangunan Rumah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	Diikutinya Tersedianya Bangunan Rumah Bantuan Stimulan Perumahan	Unit	62	62	100%	Sangat Berhasil
2	Terlaksananya Pendampingan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSJS) Rumah Layak Huni	Terpantaunya Bantuan Perumahan Swadaya (BSPS)	Kecamatan	7	7	100%	Sangat Berhasil
3	Terlaksananya Pemberian Bantuan Rumah Layak Huni ke Kampung Muyub Ilir, Linggang Muara Mujan dan Kampung Balok Asa	Tersedianya Rumah Layak Huni ke Kampung Muyub Ilir, Linggang Muara Mujan dan Kampung Balok Asa	Unit	116	116	100%	Sangat Berhasil
4	Terlaksananya Pembangunan Septik Tank Skala Individual	Tersedianya bangunan Septik Tank Skala Individual	Unit	5	5	100	Sangat Berhasil
5	Terlaksananya Pendampingan Tangki Septik Individual	Terpantaunya Pendampingan Tangki Septik Individual	Kecamatan	7	0	100	Kurang Berhasil (Kegiatan Tidak

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

							Terlaksana Dikare nakan Kegiat an Induk di **)
6	Terlaksananya Pendampingan Kegiatan PAMSIMAS	Tersedianya Pendampingan dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan PAMSIMASRuma h Swadaya (BSPS)	Kampung	27	27	100%	Sangat Berhas il
7	Terlaksananya Penyusunan DED Air Minum Lingkungan Perdesaan	Tersedianya DED Air Minum Lingkungan Perdesaan	Dokumen	4	4	100%	Sangat Berhas il
8	Terlaksananya Pembangunan Sarana Air Bersih di kampung Tanjung Jone	Tersedianya Sarana Air Bersih di kampung Tanjung Jone	Unit Sarana Air Minum	0	0	0%	Kurang Berhas il (Kegiat an tidak Terlak sana Dikare nakan Kegiat an di **)
9	Tersedianya Dana Pendampingan DAK Air Minum	Terlaksananya Kegiatan Pendampingan DAK Air Minum	SR	32	0	0%	Kegiat an tidak

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

10	Terlaksananya Pembangunan IPA di Kampung Muara Tokong (DAK Penugasan)	Tersedianya Bangunan IPA di Kampung Muara Tokong (DAK Penugasan)	SR	38	0	0	Terlaksana Dikarenakan Kegiatan di** Kegiatan tidak Terlaksana Dikarenakan Kegiatan di**
11	Terlaksananya Pembangunan IPA di Kampung Sentalar (DAK Penugasan)	Tersedianya Pembangunan IPA di Kampung Sentalar (DAK Penugasan)	SR	32	0	0	Kegiatan tidak Terlaksana Dikarenakan Kegiatan di**
12	Terlaksananya Pembangunan IPA di Kampung Temula (DAK Penugasan)	Tersedianya Bangunan IPA di Kampung Temula (DAK Penugasan)	SR	77	0	0	Kegiatan tidak Terlaksana Dikarenakan

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

							Kegiatan di**
13	Terlaksananya Pembangunan IPA di Kampung Merayaq (DAK Penugasan)	Tersedianya Bangunan IPA di Kampung Merayaq (DAK Penugasan)	SR	24	0		Kegiatan tidak Terlaksana Dikarenakan Kegiatan di**
14	Terlaksananya Monitoring dan Pengawasan Pembangunan IPA Air Minum (DAK Penugasan)	Terlaksananya Monitoring dan Pengawasan Pembangunan IPA Air Minum (DAK Penugasan)	Kampung	5	0	0%	Terlaksana Dikarenakan Kegiatan di**
15	Terlaksananya Lanjutan Penyusunan Database Perumahan dan Permukiman	Tersedianya Data Base Perumahan dan Permukiman Rawan Bencana	Dokumen	1	0	0%	Terlaksana Dikarenakan Kegiatan di**
16	Terlaksananya Fasilitasi Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi (PISEW)	Tersedianya Fasilitasi Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi (PISEW)	Kecamatan	3	100	100%	
17	Terlaksananya Konsultasi dan koordinasi Ke Luar Daerah Urusan Perumahan Kawasan	Diiikutinya Konsultasi dan koordinasi Ke Luar Daerah Urusan Perumahan Kawasan	Bulan	12	100	100%	

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

	Permukiman	Permukiman					
18	Tersedianya Dana Pendamping DAK Perumahan	Terlaksananya Pendamping dan Monitoring Pelaksanaan DAK Perumahan	Bulan/ Laporan	12	100	100%	
19	Tersedianya Dana Pendamping Sanitasi	Terlaksananya Pendamping dan Monitoring Pelaksanaan DAK Sanitasi	Bulan	12	0	100	
20	Terlaksananya Fasilitas Penetapan Kawasan Kumuh	Penetapan Kawasan Kumuh	Dokumen	1	100	100%	
21	Terlaksananya Pembangunan Tangki Septik Sekala Individual Pedesaan Minimal 50 KK di Tanjung Jan (DAK Sanitasi)	Tersedianya Bangunan Tangki Septik Sekala Individual Pedesaan Minimal 50 KK di Tanjung Jan (DAK Sanitasi)	Unit	50	100	100%	
22	Terlaksananya Pembangunan Tangki Septik Sekala Individual Pedesaan Minimal 50 KK di Jengan Danum (DAK Sanitasi)	Tersedianya Bangunan Tangki Septik Sekala Individual Pedesaan Minimal 50 KK di Jengan Danum (DAK Sanitasi)	Unit	65	100	100%	
23	Terlaksananya Pembangunan Tangki Septik Sekala Individual Pedesaan Minimal 50 KK di Geleo Baru (DAK Sanitasi)	Tersedianya Bangunan Tangki Septik Sekala Individual Pedesaan Minimal 50 KK di Geleo Baru (DAK Sanitasi)	Unit	50	100	100%	
24	Terlaksananya Pembangunan Tangki Septik Sekala Individual Pedesaan Minimal 50 KK di Sendawar (DAK Sanitasi)	Tersedianya Bangunan Tangki Septik Sekala Individual Pedesaan Minimal 50 KK di Sendawar (DAK Sanitasi)	Unit	57	100	100%	
25	Terlaksananya Pembangunan Tangki Septik	Tersedianya Bangunan Tangki Septik Sekala	Unit	50	100	100%	

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

	Sekala Individual Pedesaan Minimal 50 KK di Bigung Baru (DAK Sanitasi)	Individual Pedesaan Minimal 50 KK di Bigung Baru (DAK Sanitasi)					
26	Terlaksananya Pembangunan Tangki Septik Sekala Individual Pedesaan Minimal 50 KK di Simpang Raya (DAK Sanitasi)	Tersedianya Bangunan Tangki Septik Sekala Individual Pedesaan Minimal 50 KK di Simpang Raya (DAK Sanitasi)	Unit	65	65	100	
27	Terlaksananya Kegiatan Penunjang Bidang Sanitasi (DAK Reguler)	Terpantaunya Kegiatan DAK Bidang Sanitasi (DAK Reguler)	Kampung	6	100	100%	
28	Terlaksananya Bantuan Pembangunan Baru Rumah Layak Huni Secara Swadaya di Kawasan Permukiman Kumuh Termasuk Upah Tukang di Melak Ilir (DAK Perumahan)	Tersedianya Bantuan Pembangunan Baru Rumah Layak Huni Secara Swadaya di Kawasan Permukiman Kumuh Termasuk Upah Tukang di Melak Ilir (DAK Perumahan)	Unit	16	100	100%	
29	Terlaksananya Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Secara Swadaya di Kawasan Permukiman Kumuh Termasuk Upah Tukang di Muara Lawa (DAK Perumahan)	Tersedianya Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Secara Swadaya di Kawasan Permukiman Kumuh Termasuk Upah Tukang di Muara Lawa (DAK Perumahan)	Unit	17	100	100%	
30	Terlaksananya Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Secara Swadaya di Kawasan Permukiman Kumuh Termasuk Upah Tukang di	Tersedianya Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Secara Swadaya di Kawasan Permukiman Kumuh Termasuk Upah Tukang di	Unit	18	100	100%	

	Lambing (DAK Perumahan)	Lambing (DAK Perumahan)					
31	Tersedianya Kegiatan Penunjang Bidang Perumahan (DAK Reguler)	Terpantaunya kegiatan DAK bidang Perumahan (DAK Regular)	Bln	12	100	100%	

C. Realisasi Anggaran

Berdasarkan alokasi anggaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020, pagu dan realisasi anggaran untuk setiap bidang di lingkungan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.9
Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat Per Bidang Tahun 2020

No	Bidang/Bagian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Sekretariat	15.515.259.344,-	14.945.003.149,-	84,64
2	Bidang Kebersihan	352.511.200,-	290.170.000,-	81,63
3	Bidang Persampahan	486.785.000,-	477.029.029,-	96,70
4	Bidang Pertanahan	4.328.530.500,-	1.419.058.752,-	63,62
5	Bidang Perumahan Kawasan Permukiman	9.845.002.300,-	9.520.833.672,-	96,71
Jumlah		30.175.277.144,-	26.652.094.665,-	73,05

C. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA				
No.	Sasaran Strategis	Capaian Kinerja (≥ 100%)	Penyerapan Anggaran %	Tingkat Efisiensi 6=(3-4)
1	2	3	4	6=(3-4)
1	Mewujudkan lingkungan kota Sendawar dan sekitarnya yang bersih, asri, serta bebas sampah.	92,00	81,63	10,37
2	Meningkatkan pembangunan jalan dan jembatan dalam permukiman beserta sarana dan prasarana serta Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.	100,00	96,71	3,29
3	Meningkatkan Tertib Administrasi Pengelolaan pertanahan dan kapasitas Hukum Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.	100,00	63,62	36,38
Jumlah Persentase Tingkat Efisiensi				50,04

Pada tabel di atas Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki tiga Sasaran Strategis dengan jumlah persentase tingkat efisiensi penggunaan Sumber Daya sebesar 50,04%.

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

TABEL EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN											
Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi	Nilai Efisiensi	Persentase	Total APBD		Total Program / Kegiatan yang Dianggarkan		Jumlah Program / Kegiatan yang dialokasikan untuk mencapai sasaran		Ket.
					BL	BTL	Program	Kegiatan	Program	Kegiatan	
1	2	3	4=2-3	5=3/2*100	6	7	8	9	10	11	12
2020	36.484.107.572,57	32.060.327.523,00	4.423.780.049,57	87,87	30.175.277.144,00	6.308.830.428,57	11	124	3	94	DPKPP

Pada tahun anggaran 2020 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 36.484.107.572,57 dengan realisasi anggaran Rp. 32.060.327.523,00 dan nilai efisiensi sebesar Rp. 4.423.780.049,57 dengan persentase efisiensi anggaran sebesar 87,87%. Total Program keseluruhan Dinas berjumlah 11 program yang terdiri dari 124 kegiatan. Sedangkan Jumlah Program yang dialokasikan untuk mencapai sasaran Dinas berjumlah 3 Program yang berisi 94 Kegiatan. Efisiensi yang terjadi pada Dinas dilaksanakan dengan menggunakan anggaran yang tidak sampai 100% sehingga menghasilkan efektifitas penggunaan anggaran.

BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan pertanahan Kabupaten Kutai Barat merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksana kegiatan Tahun 2020.

LKJIP Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020 ini memberikan gambaran antara lain.

1. Secara umum Kinerja Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan Pertanahan ditinjau dari pencapaian Indikator kinerja dapat di kategorikan berhasil mencapai seluruh target, walaupun ada beberapa Indikator Kinerja yang target pencapaiannya masih perlu ditingkatkan.
2. Ditinjau dari pencapaian sasaran strategis, juga dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**, dimana dari Seluruh kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Mencapai 86,33 % .

Dengan demikian laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat menjadi parameter penyelenggaraan tugas-tugas pokok Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government yang melibatkan semua Stakeholders. Untuk kedepan diharapkan pencapaian sasaran dan hasil kerja dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan program-program kerja dan hasil kegiatan tahunan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017 - 2021 dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan Visi dan Misi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat menuju masyarakat Kabupaten Kutai Barat yang Sejahtera.

Sendawar, 15 Februari 2021

Plt. Kepala Dinas,

SAHADI,S.Hut,M.Si

NIP. 19730826 200112 1 003